

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp10,4 T (727,4%)
▼ -33,3% (yoy)

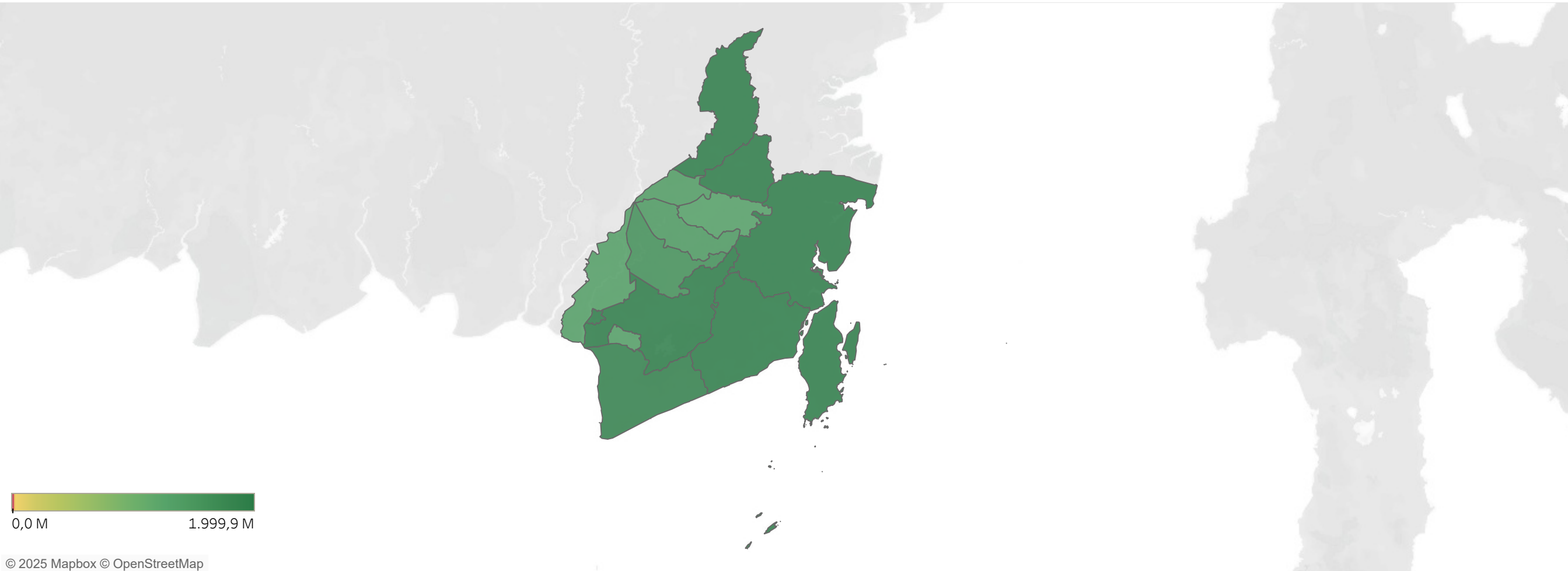
Belanja

Rp32,0 T (77,9%)
▼ -1,9% (yoy)

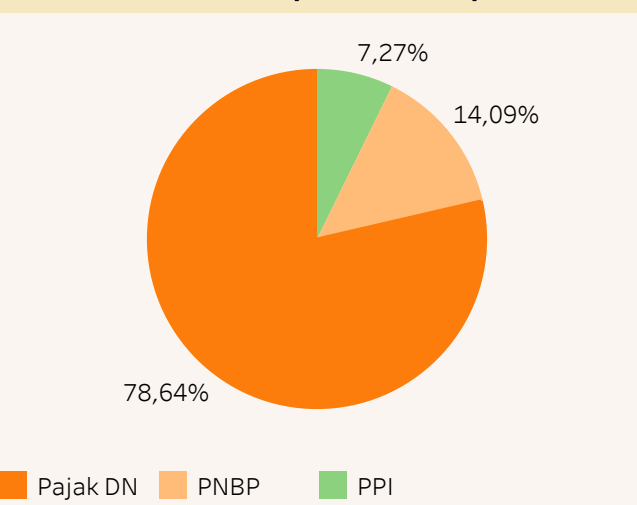
Defisit

Rp-21,6 T (54,4%)
▲ 26,8% (yoy)

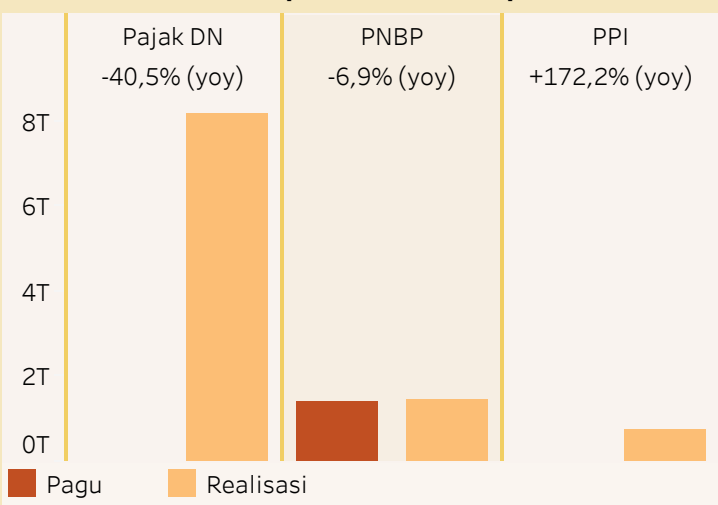
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



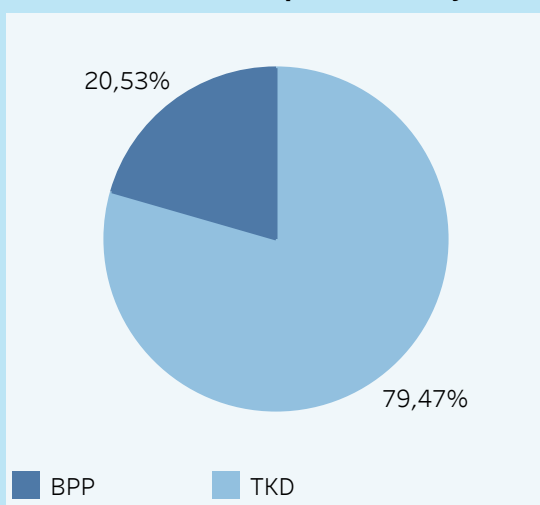
Persentase Komposisi Pendapatan



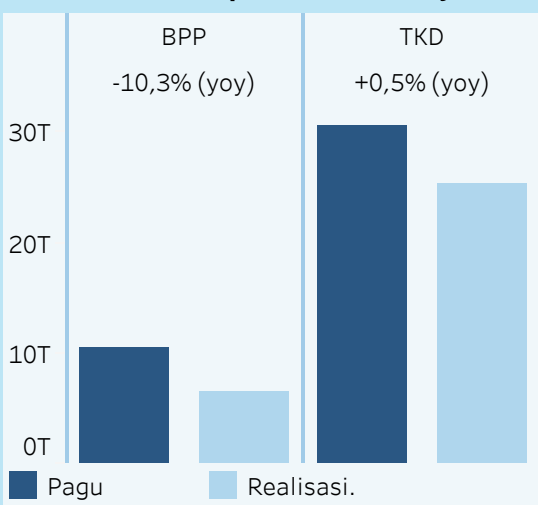
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	15,6T	10,4 T	▼ 33,28%
Grand Total	15,6T	10,4 T	▼ 33,28%

Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,7T	32,6T	78,3%	41,1T	32,0 T	77,9%	▼ 1,91%
Grand Total	41,7T	32,6T	78,3%	41,1T	32,0 T	77,9%	▼ 1,91%

Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi

		Pagu (KL)	Realisasi (KL)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	39,04%	1,87T	0,73T
KEMENTERIAN AGAMA	89,60%	1,64T	1,47T
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	80,21%	1,46T	1,17T
KEMENTERIAN PERTANIAN	16,68%	1,45T	0,24T
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	69,27%	1,09T	0,75T
KEMENTERIAN PERTAHANAN	83,45%	0,70T	0,59T
MAHKAMAH AGUNG	85,59%	0,29T	0,24T
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	58,25%	0,24T	0,14T
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	75,18%	0,22T	0,17T

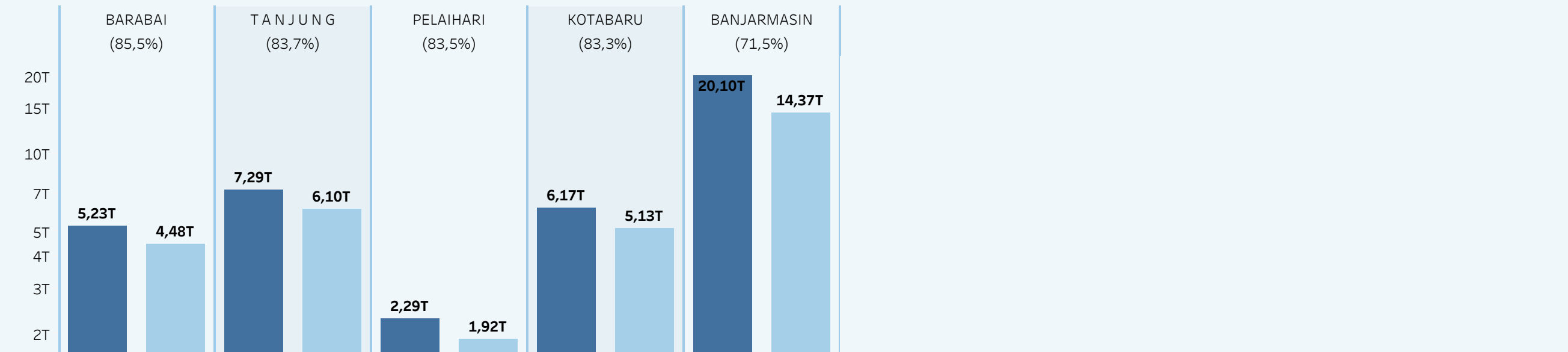
5 KL Persentase Realisasi Tertinggi

	Pagu (KL)	Realisasi (KL)
KOMISI PEMILIHAN UMUM	(90,00%)	0,11T
KEMENTERIAN AGAMA	(89,60%)	1,64T
MAHKAMAH AGUNG	(85,59%)	0,29T
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	(85,41%)	0,20T
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	(85,12%)	0,07T

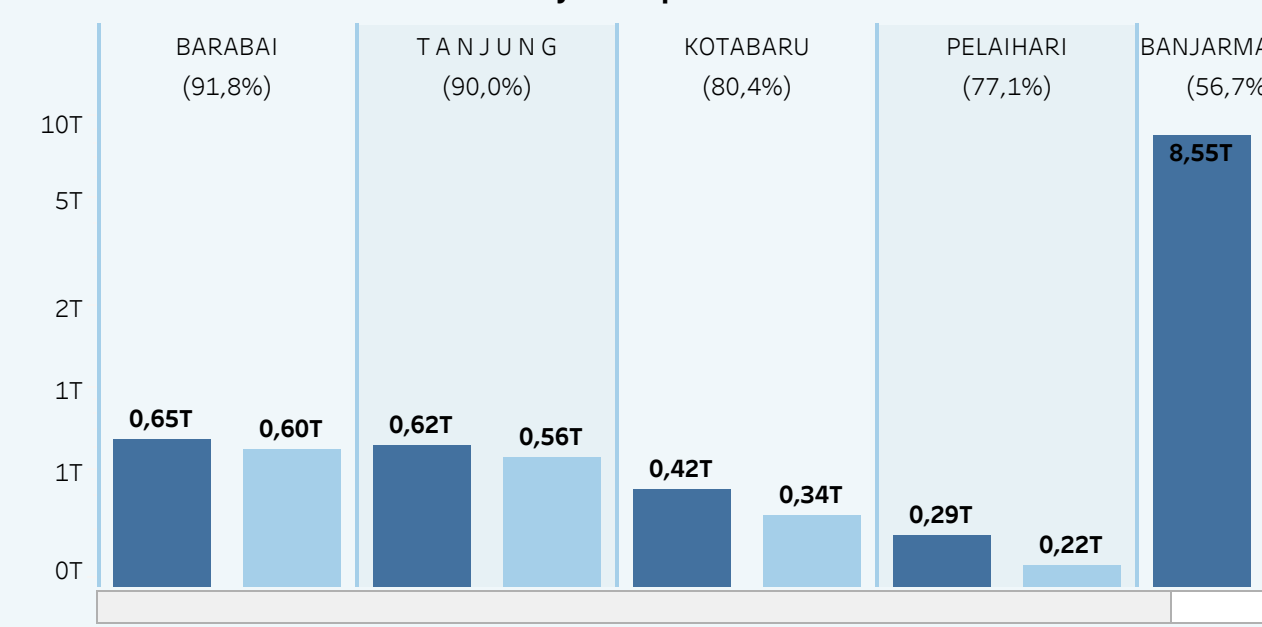
5 KL Persentase Realisasi Terendah

	Pagu (KL)	Realisasi (KL)
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MOD..	(0,00%)	0,00T
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	(0,00%)	0,00T
KEMENTERIAN KOPERASI	(0,00%)	0,02T
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(0,00%)	0,00T
KEMENTERIAN PERTANIAN	(16,68%)	1,45T

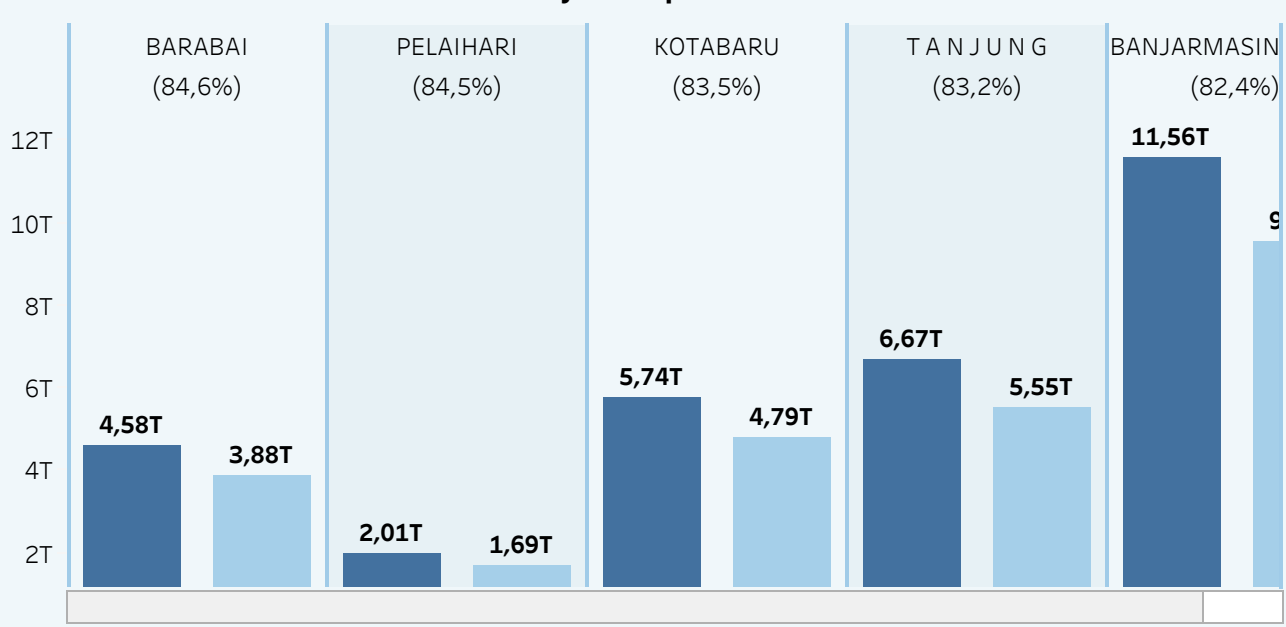
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d 31 Oktober 2025

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp10,4 triliun (47,23%) dari target sebesar Rp22,04 triliun, terkontraksi 33,3% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 40,21% (Rp 8,18 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 291,22% (Rp 756,50 miliar), serta PNPB mencapai 103,23% (Rp1,47 triliun). Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (85,91%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d 31 Oktober 2025

- Kinerja Belanja Negara sebesar Rp32,0 triliun (77,9%) dari pagu Rp41,09, terkontraksi 1,9% yoy.** Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 62,4% (Rp6,57 triliun) dari pagu Rp10,54 triliun, terkontraksi 10,27% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 83,3% (Rp25,43 triliun) dari pagu Rp30,55 triliun, tumbuh 0,5% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (82,11%).
- Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi,** Kementerian Pekerjaan Umum merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp1,87 triliun, dengan realisasi mencapai 39,04% (Rp0,73 triliun). Kementerian Agama menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 89,60% (Rp1,47 triliun) dari pagu Rp1,64 triliun. Sementara, Kementerian Pertanian menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 16,68% (Rp0,24 triliun) dari pagu Rp1,45 triliun.
- Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah,** kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum dengan realisasi 90,00% (Rp0,10 triliun) dari pagu Rp0,11 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah dialami oleh Kementerian Pertanian dengan realisasi 16,68% (Rp0,24 triliun) dari pagu Rp1,45 triliun. Dan untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koperasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM realisasinya masih 0%.
- Kinerja KPPN,** Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Barabai dengan realisasi sebesar 85,5% (Rp4,48 triliun) dari pagu Rp5,23 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 71,5% (Rp14,37 triliun) dari pagu Rp20,10 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai sampai dengan bulan September 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp681,47 miliar (260,96%) dari target sebesar Rp261,14 miliar. Seluruh pos penerimaan yaitu Bea masuk, Bea Keluar dan Cukai telah mencapai target. Sampai akhir tahun realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai diproyeksikan mencapai 284,54% dari target.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Diperlukan langkah strategis untuk mempertahankan serta mengoptimalkan kinerja positif tersebut. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan perlu melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor pendorong utama capaian, seperti peningkatan aktivitas ekspor-impor, optimalisasi pengawasan cukai, dan efektivitas pelayanan kepabeanan, sehingga proyeksi realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar 284,54% dapat tercapai.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Menteri Keuangan Nomor S-666/MK.03/2025 hal Langkah Strategis Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Akhir Tahun Anggaran 2025, disebutkan bahwa K/L tidak diperkenankan melakukan revisi anggaran dalam rangka optimalisasi sisa anggaran sumber RM. Satker BPKP Kalsel mendapatkan alokasi anggaran belanja Modal sebesar Rp1,6 M dan sudah terealisasi optimal sebesar 89% dengan seluruh capaian output telah terpenuhi 100%. Berkenaan dengan kebijakan pelaksanaan anggaran tersebut, satker BPKP Kalsel tidak dapat menggunakan/optimalisasi sisa anggaran sehingga capaian indikator penyerapan anggaran belanja modal tidak mencapai target sesuai ketentuan IKPA.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku pengampu kebijakan implementasi IKPA dapat mereviu dampak dari kebijakan terkait Langkah Strategis Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Akhir Tahun Anggaran 2025, khususnya bagi satker yang telah menyelesaikan pencapaian realisasi output sebesar 100% dari target output secara sangat efisien dalam penggunaan anggaran, namun tingkat penyerapan anggaran secara agregat perjenis belanja modal masih di bawah target ketentuan indikator penyerapan anggaran dalam IKPA

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

A | FLPP, Terdapat perubahan petunjuk teknis tata cara pengisian dan sumber data FLPP, sehingga unit yang dibangun menjadi 9.492 unit, realisasi FLPP 8.777 unit, lokasi realisasi 644 lokasi, jumlah Kab./Kota yang ada program FLPP 13 Kab./Kota, dan nominal FLPP sebesar Rp1.146.112.250.615,-

B | Giant Sea Wall, di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

C | Koperasi Desa Merah Putih, Progres realisasi anggaran masih belum terdapat realisasi dari alokasi pagu/perkiraan alokasi dana sebesar Rp6.039 M

Progres Fase I

Jumlah Desa dan Kelurahan yang Sudah Membentuk Koperasi Merah Putih dan Jumlah Koperasi Desa dan Kelurahan yang Sudah Berbadan Hukum adalah sudah maksimal seperti periode berikutnya yaitu sebanyak 2.013

Progres Fase II

2. Jumlah Koperasi yang Sudah Memiliki Akun Simkopdes (Microsite) sebanyak 2.013 sudah maksimal seperti periode sebelumnya
3. Jumlah Koperasi yang Sudah Memiliki Gerai (Minimal 1 Gerai) semula 250 menjadi 373.
4. Jumlah Keseluruhan Gerai Koperasi yang Sudah Aktif semula 307 menjadi 438.
5. Jumlah Koperasi Melakukan Permohonan Proposal Bisnis semula 59 menjadi 77.
6. Jumlah Permohonan Proposal Bisnis semula 216 menjadi 262.

D | Sekolah Rakyat, Realisasi Jumlah Sekolah Rakyat yang sudah berjalan tetap seperti periode sebelumnya sebanyak 3 SR. Saat ini, target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR

E | SMA Unggul Garuda, belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Telah dilakukan peresmian SMA Garuda Transformasi pada SMAN Banua, oleh Menteri Ekonomi Kreatif pada tanggal 8 Oktober 2025. Peresmian SMA Garuda di Kalsel ini merupakan bagian dari peluncuran serentak di 16 Sekolah Se-Indonesia yang terdiri dari 4 sekolah baru dan 12 sekolah transformasi.

F | Revitalisasi Sekolah, belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. pelaksanaan revitalisasi untuk Jumlah target sekolah yang direvitalisasi adalah 61 Sekolah yang terdiri dari 43 madrasah dan 18 sekolah di daerah transmigrasi

Progres target 43 madrasah adalah 38 madrasah dalam tahap pembangunan, dan 5 masih dalam tahap lelang pekerjaan.

Progres target 18 sekolah adalah 12 sekolah dalam tahap pembangunan, dan 6 masih dalam tahap

lelang pekerjaan

G | Ketahanan Pangan, terdapat kenaikan realisasi anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan semula Rp538,69 M (28,98%) menjadi Rp548,21M (29,5%) dari pagu sebesar Rp1,86 T.

H | Ketahanan Energi, belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Isu FLPP, meliputi:

Keterbatasan jumlah dan kapasitas pengembang lokal. Hanya sedikit pengembang yang menangani sebagian besar proyek, menandakan rendahnya partisipasi pengembang kecil-menengah.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Pemberdayaan pengembang lokal. Pemda secara aktif menyelenggarakan pelatihan, memberikan kemudahan perizinan, dan akses pembiayaan bagi pengembang baru di daerah.

C | Isu Giant Sea Wall, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall

D | Rekomendasi Giant Sea Wall, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall

E | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

1. Minimnya akses kemitraan & pembiayaan menunjukkan rendahnya literasi akses pendanaan koperasi.
2. Akses pasar terbatas. Pengembangan gerai koperasi belum merata dan belum terhubung dengan mitra strategis.

F | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

1. Perlu dilakukan pelatihan literasi keuangan, manajemen usaha, serta pemanfaatan teknologi digital bagi pengurus dan anggota koperasi. Pemerintah dan lembaga keuangan dapat memperluas program pendampingan serta menyediakan skema pembiayaan yang mudah diakses.
2. Perlu dikembangkan jaringan kemitraan strategis antara koperasi dengan pelaku usaha besar, BUMN, maupun platform digital untuk memperluas pasar, memperkuat rantai pasok, dan promosi produk unggulan koperasi secara terpadu.

G | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di tiga lokasi (Kota Banjarbaru, Kab.Batola, dan Kab.Tanah Bumbu) masih menunggu penetapan pemenang dari Menteri Pekerjaan Umum dan izin Multi Years Contract (MYC) dari Menteri Keuangan.

H | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Pemda diharapkan dapat berkoordinasi secara intens dengan satker pelaksana pembangunan di

Pemda diharapkan dapat berkoordinasi secara intens dengan satker pelaksana pembangunan di Kementerian PU terkait pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi yang baru sehingga tidak menghambat rencana proses pembelajaran.

I | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melahirkan generasi muda unggul yang '*Go Internasional*' dan kembali ke daerah untuk membangun Kalimantan Selatan.

J | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Perlu disiapkan program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan internasional bagi peserta didik berprestasi agar mampu mengembangkan wawasan global dan kompetensi internasional. Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pembinaan dan reintegrasi bagi lulusan Sekolah Garuda agar potensi dan pengetahuan yang mereka peroleh di luar daerah maupun luar negeri dapat dikontribusikan kembali untuk kemajuan Kalimantan Selatan.

K | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Revitalisasi Sekolah pada Kab. Balangan baru berjalan mulai tanggal 9 Oktober 2025

L | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Diperlukan koordinasi antara pemda, dan pihak kontraktor agar pelaksanaan fisik dan administrasi dapat berjalan paralel dan efisien. Pemda juga perlu memastikan kelengkapan dokumen pendukung, serta pengawasan berkala agar pelaksanaan proyek tidak mengalami keterlambatan lebih lanjut.

M | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Memasuki musim penghujan diperlukan antisipasi agar tidak menghambat kegiatan cetak sawah.

N | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Diperlukan kesiapan alat dan akses lapangan terutama jalan menuju lokasi yang berpotensi berlumpur atau tergenang. Selain itu perlu adanya perencanaan waktu dan tahapan kerja, dimana penjadwalan kegiatan harus disesuaikan dengan prakiraan cuaca agar pekerjaan tanah dapat dilakukan pada saat kondisi memungkinkan.

O | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat 2 pembangkit bio energi berjenis biomassa dengan jaringan *off grid* (tidak terhubung langsung dengan jaringan umum) di Kabupaten Tabalong dengan total kapasitas 2,6 MW, yaitu: Pembangkit pertama dikelola oleh PT. Cakung Permata Nusa I (ATA) di desa Kasiau dengan kapasitas 1,1 MW; dan Pembangkit kedua dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari di desa Hayub dengan kapasitas 1,6 MW.

P | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi integrasi lokal, misalnya melalui penyediaan jaringan distribusi mini-grid atau skema off-taker lokal, agar listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri di sekitar lokasi.

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Kinerja Program MBG (s.d. 31 Oktober 2025) Terdapat kenaikan jumlah SPPG sebelumnya dari 134 menjadi 138, jumlah supplier tidak berubah, tetap seperti sebelumnya 96, dan penerima manfaat sebelumnya 359.142 menjadi 398.947

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

1. Sebagian besar SPPG masih tahap pembangunan/persiapan, sehingga manfaat bagi sekolah dan masyarakat belum maksimal.
2. Kendala administratif dan penetapan pejabat pengelola memperlambat operasional.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

1. Percepat penyelesaian pembangunan dan operasional SPPG melalui koordinasi intensif antar instansi.
2. Segera tuntaskan proses administratif seperti penetapan kepala dan kelengkapan persyaratan SLHS.